



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BENGKULU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LIZAR ALFANSI
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 180047

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 725.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 708 m2/250 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 527 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/40 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. Tanah Seluas 266 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah Seluas 433 m2 di CURUP, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 163.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, HONDA HONDA BR-V1.5E MTCKD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 154.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SE88/ SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 282.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.171.214.800

F. HARTA LAINNYA Rp. 298.550.700

Sub Total Rp. 2.640.465.500

III. HUTANG Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.640.465.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.